

ABSTRAK

Muhammad Zulfikri Sya'bani (1223020112): Peran Koperasi Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Anggota menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Koperasi Syariah KKMT Kota Bandung)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam kegiatan operasional Koperasi Syariah Kelompok Kerja Majelis Taklim (KKMT) yang berdiri di bawah naungan Yayasan Nur Hasan Nirum, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui kesesuaian mekanisme operasional koperasi tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian mekanisme operasional Koperasi Syariah KKMT dengan konsep akad musyarakah sebagaimana dijelaskan dalam fikih muamalah, serta untuk menganalisis peran koperasi tersebut dalam pengembangan ekonomi anggota menurut perspektif hukum ekonomi syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus Koperasi Syariah KKMT serta dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan yang dijalankan oleh koperasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan cara membandingkan praktik yang berlangsung di lapangan dengan ketentuan akad musyarakah sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih muamalah dan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 serta Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme operasional Koperasi Syariah KKMT secara umum telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah melalui penggunaan akad musyarakah dalam kegiatan pembiayaan anggota. Koperasi ini juga telah menjalankan peran yang signifikan dalam pengembangan ekonomi anggota melalui penyediaan akses pembiayaan yang inklusif dan bebas riba, peningkatan pendapatan usaha anggota, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya terpenuhi, seperti dokumentasi akad yang belum memenuhi standar Fatwa DSN-MUI secara penuh, pemahaman pengurus terhadap substansi akad musyarakah yang masih perlu ditingkatkan, serta intensitas pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah yang belum optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Syariah KKMT telah memiliki kesesuaian secara nilai dan prinsip dengan ketentuan akad musyarakah dalam fikih muamalah dan Fatwa DSN-MUI, serta telah berkontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi anggota. Namun secara teknis, penerapan akad dan tata kelola kelembagaan masih memerlukan penyempurnaan agar benar-benar memenuhi seluruh ketentuan hukum ekonomi syariah yang berlaku.